



Rp 1,7 M Jatah

Seragam

1.035 Guru dengan Status Provinsi Tetap Dapat Endek

DENPASAR, TRIBUN BALI - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar menggelontorkan Rp 1,7 miliar untuk seragam endek di Denpasar. Total biaya tersebut dianggarkan untuk bahan endek dan ongkos jahit 3.862 pieces.

Rinciannya, endek dengan ukuran 250 x 103 cm ini akan diberikan kepada 80 orang di Disdikpora, 15 UPT dan sisanya untuk guru yang tergabung dalam PGRI di Denpasar. Dengan harga kain Rp

300 ribu, personel juga akan diberikan ongkos jahit, masing-masing Rp 150 ribu.

Tidak hanya untuk tingkat SD dan SMP yang menjadi pengelolaan kota Denpasar, begitu juga guru SMA/SMK yang akan dialihkan ke Provinsi di tahun 2017 juga dapat.

Berdasarkan data yang diperoleh *Tribun Bali*, ada 1.035 guru termasuk pengawas di tingkat SMA/SMK yang dialihkan ke provinsi atau dengan status digaji provinsi.

Kepala Seksi Perencanaan Bidang Bina Program Disdikpora Denpasar Made Sudarya menyampaikan, para guru SMA/SMK tetap diberikan bukan sekadar kenang-kenangan, namun karena terlanjur dianggarkan di 2016. "Karena sudah terlanjur dianggarkan, maka kami tetap berikan untuk guru-guru SMA/SMK. Ya ini sebagai hasil pengabdian mereka selama ini di Pemkot Denpasar," ujar Sudarya.

Plt Kepala Disdikpora Kota

Denpasar, Ngurah Jimmy Sidharta, mengatakan penerapan pengadaan dan penggunaan endek ini baru pertama kali diterapkan di Disdikpora Denpasar. Menurutnya, ini juga untuk meningkatkan pemberdayaan endek sebagai produk lokal Bali.

"Sebagai ikon. Ini untuk pertama kali. Untuk menunjukkan bahwa produk lokal kita juga berjaya," ujar Jimmy. Ia membenarkan dari total biaya yang cukup bengkak adalah untuk para guru. Di mana

ada total 3.000-an guru PNS dalam lingkup PGRI Kota Denpasar yang akan diberikan bahan tersebut termasuk ongkos jahitnya.

Terkait dengan 29 sekolah yang butuh penanganan untuk diperbaiki infrastrukturnya, saat ini masih ditunggu anggarannya. "Kami sudah sampaikan ke wali kota. Termasuk ke Inspektorat dan Bappeda. Kami selaku SKPD hanya bisa menunggu, realisasi tergantung dari pimpinan," ujar Sudarya. (cas)

Edisi : Sabtu, 5 Nov 2016

Hal : 6



Kurang Dana Rp 350 Miliar

■ Proyek Pengembangan RSUD Gianyar 2017 ■ Status Berubah Jadi RSUD Pendidikan

GIANYAR, TRIBUN BALI

- Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanjiwani Gianyar kekurangan dana senilai Rp 350 miliar. Hal itu untuk memenuhi standar RSUD tipe pendidikan.

Perbaikan tahap awal seperti yang akan dilaksanakan 2017. Di antaranya pembangunan UGD, Poliklinik dan penambahan alat kesehatan (alkes) senilai Rp 150 miliar yang dananya bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Direktur Utama (Dirut) RSUD Sanjiwani, Ida Komang Upeksha, Sabtu (5/11) menga-

takan, pihaknya sudah memiliki rancangan *masterplan* untuk 20 tahun ke depan. RSUD Sanjiwani saat ini berstatus tipe B. Dalam *masterplan* akan menjadi RSUD tipe B Pendidikan, sehingga RS ini dapat menampung praktik mahasiswa kedokteran, farmasi, dan lainnya.

Lanjut Upeksha, biaya tambahan sebesar Rp 350 miliar tersebut tidak termasuk biaya yang dipinjam Pemkab Gianyar pada PT SMI. Pinjaman senilai Rp 150 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan UGD, Poliklinik, serta penambahan alkes.

"Rp 350 miliar itu di luar Rp 150 miliar itu. Yang Rp 150 miliar itu sudah *oke*, untuk pembangunan UGD, Poliklinik dan penambahan alkes," tegasnya.

Sedangkan dana Rp 350 miliar kata Upeksha, masih dibahas lebih lanjut. Namun tidak menutup kemungkinan Pemkab Gianyar akan mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat atau Pemprov Bali.

"Bisa dari APBN, APBD Pemprov Bali atau bisa saja nanti bersumber dari APBD Gianyar. *Kan* itu bukan pembangunan tak seketika, tapi bertahap," tegasnya. (weg)

Edisi : Sabtu, 5 Nov 2016

Hal : 5